



# ASOSIASI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA

23 Februari 2021

No.: 042/ABPPTSI/II/2021

Hal: LAMEMBA

Yang terhormat  
**Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D.**  
Dirjen Pendidikan Tinggi  
Kemendikbud RI  
di Jakarta

Sebagai tindak lanjut laporan saya pada acara rapat koordinasi pada Selasa, 23 Februari 2021, khususnya mengenai LAMEMBA, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal yang berikut.

1. ABP PTSI menyambut dengan baik lahirnya LAMEMBA sebagai lembaga akreditasi mandiri, yang merupakan tuntutan undang-undang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan PTS.
2. Terkait dengan pembiayaan dalam operasional LAMEMBA yang dibebankan kepada PTS, perlu ada kebijakan dalam penetapan biaya operasional LAMEMBA. Seperti kita ketahui bahwa, disparitas kemampuan finansial PTS sangat tinggi dan beragam. Oleh karena itu, sebagai wujud dari tanggung jawab pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kami berharap agar masih ada subsidi pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi mandiri, khususnya kepada PTS yang dikategorikan jumlah mahasiswanya masih minim. Hal ini sejalan dengan Permendikbud No. 5 tahun 202, khususnya Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "**Pendanaan LAM Masyarakat bersumber dari dana Masyarakat, sumber lain atau dapat bersumber dari dana pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**".
3. Kami mohon agar biaya akreditasi oleh LAMEMBA ditetapkan berjenjang berdasarkan jumlah mahasiswa.
4. Berdasarkan Permendikbud No. 5 tahun 2020, tugas pemantauan merupakan kewenangan BAN PT, sehingga pembiayaan terkait pemantuan tidak diperlukan. Oleh karena itu, diusulkan agar beban pembebanan biaya cukup untuk akreditasi saja.

Demikian beberapa yang perlu kami sampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

**ASOSIASI BP PTS INDONESIA**

Pengurus Pusat,

**Thomas Suyatno**  
Ketua Umum



**Prof. Dr. M. Arief, M.B.A., CPM.**  
Sekretaris Jenderal

**Tembusan:**

Yth. Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti, Kemendikbud RI.